

Forum Freedom 56, 12 Juni 2006

Tema: Pancasila I

Nara sumber : Dawam Rahardjo

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

Hamid Basyaib

Halo, selamat pagi saudara... Anda berjumpa lagi dengan Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Satu program yang diselenggarakan Freedom Institut Jakarta bekerjasama dengan radio KBR 68 H. Tamu saya pagi ini Profesor M. Dawam Rahardjo. Selamat pagi Mas Dawam...

DR

Selamat pagi...

HB

Kita akan berbincang tentang Pancasila. Ini karena bulan Pancasila, bulan Juni. Saya kira latar belakangnya sudah tahu semua. Minggu lalu Anda menjadi pembicara dalam seminar Pancasila di UI, dan memeras intisari Pancasila menjadi tiga bagian: sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Pertanyaan pertama: apa urgensi dari peringatan hari kelahiran Pancasila saat ini?

DR

Begini. Sejak reformasi terdapat kesan bahwa Pancasila itu telah ditinggalkan oleh masyarakat. Sebagai dampak pada masa orde baru. Jadi pada masa orde baru itu diterapkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai demokrasi yang bukan sebenarnya. Atau demokrasi yang tidak lazim (*uncommon democracy*). Sekarang kalau kita kembali kepada sila, ini sebetulnya merupakan satu *surprise* tapi menggembirakan. Jadi orang itu masih gamang, khawatir. Saya mendengar ini di beberapa diskusi: kenapa kita harus kembali kepada Pancasila? Ya karena Pancasila sudah gagal. Pancasila dilaksanakan secara keliru, secara salah oleh orde baru.

Nah sekarang harus bagaimana menghidupkan kembali Pancasila? Bagaimana sikap dan pengertian kita terhadap Pancasila? Saya melihat di masa orde baru itu Pancasila dimengeri secara keliru, yaitu diidentikkan dengan atau bersumber dari paham integralistik yang dikemukakan oleh Prof. Soepomo.

HB

Bagaimana penjabarannya?

DR

Sebetulnya Soepomo di dalam pidatonya yang terkenal itu menguraikan tiga sumber dasar atau konsep mengenai negara. Itu mengacu pada tiga sumber. Pertama, dari aliran individualisme dan liberalisme. Kedua, dari aliran kelas atau marxisme. Ketiga, integralistik. Dan Soepomo terkesan pada negara integralistik.

HB

Negara integralistik itu kira-kira menganggap negara seperti keluarga ya?

DR

Konsep negara integralistik itu sebetulnya dari Adam Muller. Konsep itu menghendaki adanya kesatuan agama, negara, dan masyarakat. Di dalam negara integralistik itu individualisme tidak diperlukan. Individu tidak diperlukan. Karena sudah ada dengan sendirinya. *Human right* itu sudah tercakup di dalamnya. Itu asumsi.

Profesor Soepomo mengemukakan tiga tokoh besar sebagai sumber: Hegel (Idealisme Hegel), Muller, dan Spinoza. Kita tahu bahwa Hegel menghendaki *ideal state*. *Ideal state* itu adalah negara sebagai pungkasan sejarah, sebagai *end of history*. Jadi *civil society* menurut Hegel akan hancur karena adanya konflik dari dalam. Akhirnya *civil society* itu akan digantikan oleh negara, sehingga yang ada hanya negara. Masyarakat itu tidak ada. Sedangkan dari Spinoza adalah konsep tentang monisme. Kesatuan antara Tuhan, masyarakat, umat. Itu merupakan satu kesatuan.

Soepomo sendiri bukan seorang ahli tata negara. Bukan pula ahli teori politik. Ia ahli hukum adat. Karena itu referensinya sebetulnya hukum adat. Jadi yang dimaksudkannya itu sebetulnya adalah masyarakat gotong royong, masyarakat kekeluargaan. Itu yang dimaksudkan.

HB

Jadi dia meminjam konsep dari tiga filsuf besar Eropa itu untuk mencari pendasaran ilmiah ya?

DR

Kira-kira seperti itu. Jadi dia itu sebetulnya ingin mengemukakan gagasan hukum adat, tapi didasarkan pada teori barat.

HB

Nah bagaimana penjabarannya?

DR

Penjabarannya kan diintegrasikan ke dalam UUD 45, yang disebutnya sebagai undang-undang dasar gotong royong. Soepomo sendiri, sebagaimana saya katakan tadi, cenderung pada integralistik. Tapi ketika dia mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu tidak diperlukan, itu dianggap berbahaya oleh Hatta dan M. Yamin. Mereka bilang, “Jika Hak Asasi Manusia tidak ada, enggak bisa dong mengatakan kebebasan sipil itu akan terjamin. Jadi Hak Asasi Manusia itu harus dicantumkan dalam UUD 45...”

Itu berhasil. Paling tidak ada tujuh pasal di dalam UUD 45 yang mengadopsi hak-hak dasar manusia atau Hak Asasi Manusia. Misalnya saja setiap warga Negara berhak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebebasan di dalam berpendapat dan berkumpul. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk berkebudayaan. Kemudian fakir miskin dan golongan lemah harus mendapat santunan dari negara. Itu semua sebetulnya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dan setelah Hak Asasi Manusia itu dimasukkan di dalam UUD 45, berarti itu menjadi hak sipil, *civil right* atau *civil liberty*. Jadi menurut hemat saya, UUD 45 itu berdasarkan pada prinsip-prinsip *civil liberty*.

Karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya yang lebih banyak dan paling dominan diambil dalam perumusan BPUPKI itu adalah paham liberal. Bukan integralistik. Integralistik malah ditentang. Cuma formalnya saja gotong royong, tapi isinya liberal.

HB

Kalau saya tidak salah, Profesor Soepomo sendiri yang menulis penjelasan UUD 45?

DR

Enggak juga. Dia dibantu sama yang lain. Hatta sumbangannya sangat banyak.

HB

Maksud saya, waktu membuat penjelasan?

DR

Iya, waktu membuat penjelasan maupun waktu mengusulkan pasal. Pasal 33 dan 34 yang mengusulkan Bung Hatta; pasal 27 ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia yang mengusulkan Bung Hatta. Kemudian pasal kebudayaan. Pasal itu diusulkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi tidak sendirian.

HB

Mas Dawam, Anda ingin mengatakan bahwa versi orde baru itu sebenarnya diilhami oleh model tafsir Soepomo?

DR

Ya, betul.

HB

Mestinya *civil liberties*?

DR

Kalau kita mengacu pada UUD 45, kita tidak bisa berpedoman pada pikiran Soepomo, Hatta, Soekarno. Tidak bisa. Tapi berpedoman pada apa yang sudah dirumuskan.

HB

Yang sudah jadi dan disepakati?

DR

Bahkan Pancasila-nya Bung Karno pun direvisi. Pancasilanya Bung Karno itu tidak mentah-mentah diterima. Tidak. Istilah-istilahnya semua diganti. Jadi Pancasila yang kita terima adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Bukan yang dikatakan oleh Bung Karno.

HB

Manurut Anda, apakah (isi) Pancasila itu sudah menampung aspirasi masyarakat?

DR

Seperti sekarang ini masyarakat ingin kembali pada Pancasila. Ingin membuat masyarakat bersatu, bhineka tunggal ika. Kalau ingin membuat masyarakat bersatu, itu cantolannya pada Pancasila. Kenapa Pancasila itu bisa dijadikan cantolan/sandaran? Karena Pancasila itu cukup liberal. Jadi bukan *uncommon democracy*, tapi *common democracy*. Itu pertama. Kedua, Pancasila itu didasarkan diri pada pluralisme; pada

kebinekaan tunggal ika; pada pluralitas masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, bangsa, dan golongan-golongan. Kita membutuhkan satu perekat atau model komunikasi yang bisa mempersatukan dan mencipatakan kegotongroyongan. Itu adalah pluralisme. Ketiga, Pancasila itu merupakan penolakan terhadap konsep negara agama. Di sini yang paling ditolak adalah konsep negara Islam. Konsep negara Islam itu ditolak. Ketentuan yang tadinya mau menempel di dalam Pancasila tentang penerapan syariat Islam, itu dihapus. Jadi Pancasila itu bukan (konsep) negara agama. Nah kalau bukan negara agama, ya berarti negara sekuler.

HB

Enggak ada pilihan lain ya?

DR

Tidak ada.

HB

Tidak ada pilihan bentuk antara. Tidak ada pilihan antara sekuler tapi religius, agama atau sebaliknya?

DR

Tidak ada. Tapi ada juga sekuler, dalam pengertian bukan sekularisme yang curiga terhadap agama; yang antipati terhadap agama; tetapi sekularisme yang ramah terhadap agama. Tapi bukan hanya satu agama, khususnya Islam yang mayoritas. Sekularisme yang ramah terhadap semua agama. Jadi semua agama itu memperoleh perlakuan yang sama. Jadi sekularisme itu sebetulnya sikap netralitas negara terhadap agama.

HB

Tadi Mas Dawam mengatakan bahwa Pancasila adalah satu sistem sekuler yang ramah agama. Bukan hanya ramah pada satu atau dua agama, tapi pada semua agama yang hidup. Dengan kata lain, Pancasila atau negara (konsep) sekuler versi Indonesia ini adalah negara (konsep) yang netral agama. Nah pengertian semacam ini sepertinya agak baru atau agak lain sebagaimana dipahami banyak orang selama ini. Banyak orang menganggap bahwa Negara sekuler atau sekularisme itu sesuatu yang niscaya buruk. Kenapa Anda berpikir berbeda?

DR

Begini. Kalau kita telusuri sejarahnya, sebetulnya sekularisme itu jelas. Hanya kita ini salah paham. Kita beranggapan bahwa sekularisme itu berlaku pada agama Kristen. Karena agama Kristen dianggap sebagai penyebab timbulnya sekularisme.

HB

Terutama di Prancis ya?

DR

Pada umumnya (sekularisme) ini terjadi di Eropa. Seolah-olah sekularisme ini tidak berlaku atau tidak relevan untuk Islam. Tapi saya berpendapat tidak. Pada masa Abad Pertengahan, Eropa itu didominasi oleh otoritas Gereja. Jadi ada perselingkuhan antara negara dengan agama dan menimbulkan apa yang disebut absolutisme. Perry Anderson menjelaskan dengan cukup gamblang mengenai absolutisme ini. Nah sekularisme itu

pada dasarnya menentang atau ingin menghancurkan absolutisme itu. Yakni dengan cara memisahkan otoritas agama dengan negara. Karena masalahnya berbeda. Kalau masalah-masalah politik itu harus mendapat legitimasi dari agama, lalu muncul pertanyaan: apakah agama mampu (berhak) memberi legitimasi?

HB

Misalnya Islam. Islam juga banyak versinya?

DR

Ya. Dan saya kira tidak mungkin suatu hukum dalam satu negara di manapun juga yang ditetapkan/didasarkan pada kepercayaan, pada iman. Iman itu bersifat individual. Iman itu hanya diyakini oleh individu, bukan merupakan keyakinan kolektif. Bukan merupakan *collective decision*.

HB

Anda ingin mengatakan bahwa agama pada dirinya sendiri sebenarnya adalah urusan privat?

DR

Iya dong. Agama khususnya menyangkut akidah. Tapi yang menyangkut muamalat; yang menurut akhlak, itu berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya.

HB

Pada akhirnya bisa dijadikan satu sistem sosial?

DR

Bisa..

HB

Tadi Anda bilang agama tidak bisa dijadikan dasar?

DR

Bisa. Tapi memerlukan dasar-dasar tertentu. Agama itu harus mengalami rasionalisasi dan obyektivasi. Kemudian harus didiskusikan (?) secara demokratis. Jadi harus melalui tahap itu. Baru dia menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat.

HB

Apa misalnya yang bisa diobyektivasikan dan dirasionalisasikan?

DR

Misalnya perbankan syariah. Perbankan syariah itu kan didasarkan pada iman; didasarkan pada kepercayaan bahwa bunga bank itu haram. Tapi haram itu berlaku bagi orang Islam saja. Bagi orang lain tidak, sehingga negara tidak boleh melarang bunga bank dan menutup bank-bank konvensional. Tapi apakah kita tidak boleh melaksanakan prinsip (perbankan syariah) itu? O, boleh. Itu bisa saja. Itu setelah diadakan wacana ilmiah. Dalam hal ini harus ada argumen kuat dan rasional. Misalnya perbankan syariah itu bisa menjamin keadilan, efisiensi, dan mendorong pertumbuhan. Itu harus ada pendasaran ilmiahnya. Itu satu.

Kedua, harus diterima atau ditawarkan oleh pasar. Pasar itu menerima sistem bunga atau tidak. Kalau diterima, itu *ok*. Ketiga, kalau mau mengadakan legislasi misalnya mengenai peraturan perbankan syariah, enggak apa-apa. Buatlah legislasi dan diskusikan di parlemen. Kalau parlemen itu menerima, ya jalan. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tetapi sebelum diterima di parlemen, itu kan harus ada alasan-alasan yang cukup kuat. Alasan rasional dan alasan pasar. Kalau tiga hal ini bergabung menjadi satu, maka syariat Islam itu bisa dilaksanakan. Jadi saya tidak menolak pelaksanaan syariat Islam. Tidak anti syariat Islam. Tetapi proses dan prosedurnya harus jelas. Jangan sampai pelaksanaan syariat Islam itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Misalnya membuat satu undang-undang yang melarang bunga bank. Itu kan melanggar Hak Asasi Manusia.

HB

Tapi para pendukung syariat Islam ini menganggap bahwa prinsip (perbankan syariah, dsb) ini tidak bisa ditawar-tawar dan didiskusikan. Karena ini adalah ajaran/prinsip yang berasal dari langit, dari Tuhan. Ini bagaimana?

DR

Itu tidak bisa.

HB

Bagaimana Anda menawar-nawar atau merundingkan sesuatu yang berasal dari Tuhan?

DR

Bisa saja. Ya, melalui konsep rasionalisasi tadi. Jadi melalui pemikiran rasional dan empiris berdasarkan test di pasar. Kemudian dirundingkan melalui proses demokrasi, sehingga orang lain bisa menerima. Misalnya Profesor Toby Mutis. Dia adalah orang Katolik yang sangat kental. Dia menerima dan mendukung pendirian bank syariah. Tapi belum tentu semuanya setuju (tak harus disetujui semua). Itu secara sukarela. Hukum agama, istilah Sjafrudin Prawiranegara, itu adalah *voluntarily law*.

HB

Hukum yang ditaati secara sukarela. Itu mungkin bedanya sama mereka yang menganggap (hukum agama) itu bukan sukarela. Merka menganggap bahwa hukum agama itu harus dipaksakan. Itu tidak akan ketemu (ujungnya). *Ok*, kita kembali lagi pada perbincangan mengenai Pancasila. Anda tadi mengatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan Soepomo berdasarkan rumusan integralistik mempunyai perbedaan mendasar dengan pemahaman Anda. Anda menganggap bahwa landasan awal dari Pancasila dan UUD 45 itu adalah *civil liberties*. Anda pun mengatakan bahwa sekarang Pancasila disalahpahami dan dimanipulasi oleh orde baru yang memilih model pendekatan Soepomo. Kita tahu bahwa sekarang orang begitu pesimistis dengan Pancasila. Tapi di sisi lain masih membutuhkan Pancasila itu. Lalu bagaimana caranya supaya Pancasila yang dianggap *notorius* oleh sebagian orang ini bisa dihayati dan dimaknai oleh bangsa kita yang plural? Bagaimana merevitalisasi Pancasila ini?

DR

Kita harus berusaha untuk melakukan pemahaman kembali makna demokrasi dan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi dan apa itu Pancasila. Seperti yang saya katakan tadi, Pancasila saya operasionalkan dengan tiga prinsip: pluralisme (kemajemukan),

liberalisme (*civil liberty* atau kebebasan sipil), sekularisme. Kalau kita tidak suka istilah yang terakhir ini, kita bisa menggantinya dengan kata kebangsaan. Itu kan sudah mencukupi. Istilah kebangsaan itu sudah dengan sendirinya sekuler. Jadi kita harus menjelaskan itu. Kita wacanakan lagi di dalam masyarakat. Kita menjelaskan secara operasional mengenai apa yang kita maksud dengan pancasila, sehingga kita bisa melaksanakan secara benar.

HB

Kita lihat peran negara kurang begitu peduli dengan Pancasila. Di era Megawati, kita jarang mendengar dari mulut Megawati menyebut kata itu. Di era sekarang, Yodhoyono baru sekali menyebutnya ketika bulan Juni lalu. Ini luar biasa. Sebuah ideologi yang masih diakui dan tercantum dalam semua produk undang-undangnya tapi kurang dipedulikan kepala negaranya?

DR

Ada dua penjelasan. Pertama, barangkali mereka (para pejabat) trauma menyebut-nyebut Pancasila. Mereka takut dituduh kembali ke orde baru. Mereka lebih suka menyebut istilah 'reformasi', 'amandemen', dsb. Kedua, kita ini lupa. Tidak hanya negara yang lupa, tapi juga masyarakat. Bahkan kalangan akademisi pun lupa. Saya merasa *surprise*, dalam situasi seperti ini, ada orang yang menghendaki kembali pada Pancasila. Goenawan Moehamad pun berargumen pentingnya kembali pada Pancasila. Kenapa? Karena ternyata Pancasila itu dibutuhkan. Pancasila itu solusi.

HB

Jadi bagaimana langkah praktisnya?

DR

Ini harus segera diselesaikan. Ini final. Kita harus mengatakan dengan gamblang bahwa negara kita adalah negara sekuler.

HB

Itu ditetapkan di konstitusi?

DR

Tidak tahu. Tapi paling tidak ada statemen dari kepala negara dengan menegaskan bahwa kita ini sesungguhnya negara sekuler. Dalam pengertian bahwa negara itu netral terhadap agama; bersikap adil terhadap agama; tidak pilih kasih; dan tidak menganggap agamanya benar dan yang lain salah. Negara harus mengambil sikap bahwa semua agama itu benar dan adil.

HB

Kalau dilaksanakan, saya kira itu tidak banyak masalah sepanjang penjelasannya masuk akal...

DR

Sebetulnya hal itu saya harapkan dari pidatonya SBY. Tapi ternyata enggak keluar.

HB

Baik, waktunya habis. Begitulah akhir dari Forum Freedom kita. Kita berjumpa lagi Minggu depan. Terima kasih dan wassalam...

